



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

* Kampus Limau Manis, Kotak Pos No. 87, PADANG - 25163. Telp. (0751) 72701 - 72702 Fax. (0751) 72702
* Cabang PAYAKUMBUH, Telp. (0752) 92084

e-mail : FPUA @ Padang. Wasantara.net.id

Kode W.D.a.4

SURAT TUGAS

Nomor : 21339 /H.6.1/PP/2009

Sehubungan dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutan Republik Indonesia a.n. **Dr.Ir. Aprisal, MSi** untuk ikut dalam anggota Tim Terpadu Independen dalam Mengkaji dan Meneliti Usulan Perubahan Peruntukan dan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka atas pimpinan Fakultas Pertanian Menugaskan saudara dalam kegiatan tersebut. Setelah selesai melaksanakan Kajian tersebut agar segera menyapaikan Laporan nya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Juli 2009

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas



[Signature]
Prof.Ir. Ardi, MSc
NIP. 130 816 270



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK. 412 /MENHUT-VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bersarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Barat seluas 2.560.388 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan usulan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/786/DiISHUT-2009 Tanggal 20 Maret 2009, terdapat perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3419);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang Undang ...

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia 3844);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009, tanggal 20 April 2009 tentang Tata Cara Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

DALAM ...

DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kompilasi data dan informasi secara komprehensif yang diperlukan dalam rangka penelitian terhadap dampak perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berkaitan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing;
 3. Menyusun rekomendasi teknis terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
 4. Melaporkan hasil penelitian kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Terpadu wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh, cermat, jujur, obyektif dan transparan dengan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana tersebut pada diktum kedua dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Juli 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Pejabat Eselon ...

8. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
9. Gubernur Sumatera Barat;
10. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
11. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada;
12. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
17. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
18. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Pengarah : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- Penanggung Jawab : Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Teknis
Planologi Kehutanan.
- Koordinator : Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah I.
- Ketua : Drs. Suhardjono.
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Anggota : 1. Tri Agustin
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Arif Yoga Samekto, ST, MT.
Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
3. Suhartono, S.Sos, MM.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
4. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
5. Rokhmadi, SH.
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
6. Prof. DR. M. Bismark, MS.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
7. Elvida Yosefi Suryandari, S.Hut, M.SE.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
8. Ir. Wahyu Wardoyo.
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
9. Dedi Humaedi, S. Hut.
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
10. Anis Susanti Aliati, S. Hut, M.Si.
Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
11. Ir. Untung Lusianto.
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

12. Ir. Bagus Subiantoro.
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I,
Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
13. Drs. Suharman B.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat;
14. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Barat;
15. Ir. Hersum Pedris, MM.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Dr. Ir. Djuwantoko, M.Sc.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
17. **Dr.Ir. Afrizal, MS.**
Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang;
18. Ir. Yon Sudijanto, MM.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
19. Ir. Zahari H. Sipayung.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
20. Rahman Panjaitan, SP, M.Si.
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
21. Gunardo Agung Prasetyo, SH, M. Kum.
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
22. Ir. Heri Iriawan, MT.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.

Sekretariat

- : 1. I Gusti Raka Wisnu, SP.;
2. Arif Pratisto, S. Hut, M.Sc.;
3. Parulian BP, S.Sos.;
4. Ruchyantoni Hidayat;
5. Eddi Sumantri;
6. Heni Hartati.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 7 Juli 2009



H. M. S. KABAN



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2
Jl. Gatot Subroto – Jakarta 10270
Telepon : (021)5730277, 5730295; Facsimile : 5720216; P.O. Box 6506 Jakarta 10065

25 Januari 2010

Nomor : UN .10 /VII/REN-2/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : U n d a n g a n

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr.
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka penyelesaian Laporan Akhir Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat., dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at/5 Pebruari 2010
Jam : 08.30 WIB s/d selesai.
Tempat : Hotel Pangrango II, Jalan Pajajaran Raya No. 32 Bogor, Jawa Barat
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Terpadu
Acara : Rapat Pleno Laporan Akhir hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review RTRWP Sumatera Barat.

Mengingat pentingnya acara tersebut mohon dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Direktur
Ir. Basoeki Karyaatmadja, MSc.
NIP. 19571002 198203 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutan;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Undangan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan
Nomor : Un. 10 /VII/REN-2/2010
Tanggal : 25 Januari 2010.

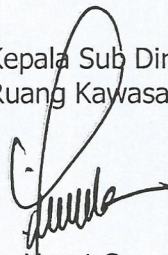
DAFTAR YANG DIUNDANG

Tim Terpadu Sumatera Barat.

1. Drs. Suhardjono.
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Tri Agustin.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. M. Ikhsan FST.
Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum;
4. Suhartono, S.Sos, MM.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
5. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Rokhmadi, SH.
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
7. Prof. DR. M. Bismark, MS.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian
dan Pengembangan Kehutanan;
8. Elvida Yosefi Suryandari, S.Hut, M.SE.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan;
9. Ir. Wahyu Wardoyo.
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan;
10. Dedi Humaedi, S. Hut.
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan;
11. Anis Susanti Aliati, S. Hut, M.Si. Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat
Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
12. Ir. Untung Lusianto.
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial;
13. Ir. Bagus ...

13. Ir. Bagus Subiantoro.
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
14. Drs. Chaidir Yusuf, MBA.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
15. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Ir. Hersum Pedris, MM.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Dr. Ir. Djuwantoko, M.Sc.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
- ✓ 18. Dr. Ir. Afrizal, MS.
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang;
19. Ir. Yon Sudijanto, MM.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
20. Ir. Zahari H. Sipayung.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
21. Rahman Panjaitan, SP, M.Si.
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
22. Gunardo Agung Prasetyo, SH, M. Kum.
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
23. Ir. Heri Iriawan, MT.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.
24. Sekretariat Tim Terpadu.
25. Staf Sub Direktorat Penataan Ruang Kawasan hutan Wilayah I

Kepala Sub Direktorat Penataan
Ruang Kawasan Hutan Wilayah I,



Ir. Yayat Surya, MM
NIP 19630221 198903 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Alamat : Gedung Mangrove Wimaloka Blok 1 Lantai 2
Jl. Gatot Subroto - Jakarta 10270

Telepon : (021)5730277, 5730295; Faksimile : 5720216, P.O. Box 6506 Jakarta 10065

Nomor : UN. 414/VI/REN-3/2009
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

04 Agustus 2009

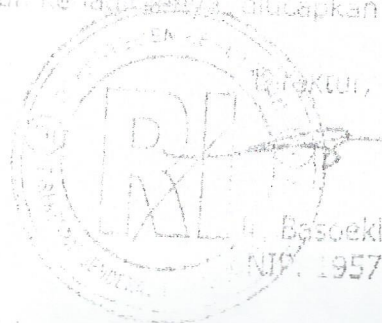
Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr.
(daftar terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 412/MENHUT-
VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka
Penelitian Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan dalam Usulan Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan hasil pertemuan Tim Teknis
pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009, dengan hormat kami mengundang
Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin/ 10 Agustus 2009.
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Pangrango 2, Jl. Raya Pajajaran No. 32 Bogor
Pimpinan Rapat : Direktur Perencanaan kawasan Hutan
Acara : Pembahasan Hasil Kerja Tim Teknis.

Mengingat pentingnya acara tersebut mohon dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Basoeki Karyaatmadja, MSc.
NIP. 19571002 198203 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

ASISTENSI : DINAS KEHUTANAN PROV. DATA SUNDA

NO. DOK. : 522.1

NO. SURAT : 3064

TANGGAL : 5 - 8 - 2009

Lampiran Surat Direktur Perencanaan Kawasan Hutan

Nomor : Un. 454 /VII/REN-3/2009

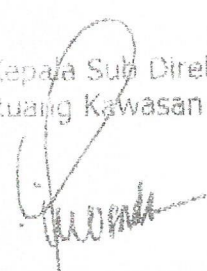
Tanggal : 04 Agustus 2009.

DAFTAR YANG DIUNDANG (Tim Terpadu Sumatera Barat):

1. Drs. Suhardjono.
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Tri Agustin.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Arif Yoga Samekto, ST, MT.
Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum.
4. Suhartono, S.Sos, MM.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
5. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
6. Rokhmadi, SH.
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
7. Prof. DR. M. Bismark, MS.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
8. Elvida Yosefi Suryandari, S.Hut, M.SE.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan.
9. Ir. Wahyu Wardoyo.
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan.
10. Dedi Humaedi, S.Hut.
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan.
11. Anis Susanti Aliati, S. Hut, MSI.
Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan
Konservasi Alam.
12. Ir. Untung Lusianto
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial,
13. Ir. Bagus Subiantoro
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan.
14. Drs. Suharman B.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
15. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

16. Ir. Hersum Pedris, MM.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
17. Dr. Ir. Djuwantoko, M.Sc.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
18. Dr.Ir. Afrizal, MS.
Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang.
19. Ir. Yon Sudijanto, MM.
Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
20. Ir. Zahari H. Sipayung.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
21. Rahman Panjaitan, SP, Msi.
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
22. Gunardo Agung Prasetyo, SH, M.Kum.
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
23. Ir. Heri Iriawan, MT.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.
24. Agus Ropendi
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.
25. I Gusti Raka Wisnu, SP.
Direktorat Perencanaan kawasan Hutan.
26. Arif Pratisto, S. Hut, M.Sc.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.
27. Staf Subdit Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I.

Kepala Sub Direktorat Penataan
Ruang Kawasan Hutan Wilayah I,


Ir. Yayat Surya, MM

NIP 19630221 198903 1 001